

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Atiyah, *The Law of Contract*, (London: Clarendon Press, 1983)
- Bentham, Jeremy, *The Theory of Legislation*, diterjemahkan oleh Nurhadi, (Bandung: Nusamedia, 2006)
- Chairul, Huda, *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana"*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Effendy, Marwan, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, (Jakarta: Referensi, 2013)
- Hadjon, Philipus M., *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986)
- Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

- Huda, Chairul, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangka Education, 2012)
- Ismansyah, *Kriminalistik*, (Padang: Universitas Andalas, 1993)
- Kagramanto, L. Budi, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, (Surabaya: Srikandi, 2007)
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusamedia, 2008)
- Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000)
- Latif, H. Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Meliala, Djaja S., *Hukum Perjanjian Khusus*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Liberty, 2019)
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1984)
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, (Bandung: PT. Alumni, 2011)
- Nieuwenhuis, J. H., *Hoofdstuken verbintenissenrecht*, terjemahan Djasadin Saragih, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985)
- Pane, Musa Darwin, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Logos Publishing, 2017)
- Posner, *Economic Analysis of Law*, Cet. Ke-4, (Boston: Little Brown And Company, 1992)

- Pratisthita, Ni Made Saraswati and I Gusti Ngurah Wairocana, *Penyalahgunaan Wewenang Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018)
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas*, Cet. ke-1, (Depok: Kencana, 2017)
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016)
- Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Purwosutjipto, H. M. N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Saidi, Muhammad Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet. ke-3, (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Sirait, N. Natasya, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan: Pustaka Bangsa Press 2003)
- Sjawie, Hasbullah F., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Soeroso, R., *Perjanjian dibawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam. Teori dan Praktik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Susanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Cet. ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Suyono, Yoyok Ucok, *Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020)

Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016)

Triwulan, Titik dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010)

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001)

Weele, A. V., *Purchasing and Supply Chain Management*, (London: Cengage Learning EMEA, 2010)

Artikel Jurnal

Absori dkk., "Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan dengan Pendekatan Partisipatif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2006.

Alkostar, Artidjo, "Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi", *Varia Peradilan* No. 275, 2008, hal. 36.

Anggaraini, Anna Maria Tri, "Tinjauan Terhadap Penafsiran Frasa "Pihak Lain" Dalam Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 3.

Ardiansyah, Rendi dan Margo Hadi Pura, "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Praktik Persekongkolan Tender (Studi Putusan Nomor:04/KPPU-L/2018)", *Wajah Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2021, hal. 344.
<<https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.398>>.

Ashari, A., "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan NO 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mtr)", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 4 No. 4, 2020. <<https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1454>>

Betham, Ashari Abd. Asis, Nasrun Hipan, and Firmansyah Fality, "Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 3 No. 2, 2019, hal. 191–212.

- Dwiyantama, Rayhan Wardhana Hascarya, "Studi Perbandingan Hukum Perwujudan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Antara Inggris Dan Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 4 No. 1, 2023, hal. 1–7.
- Eman, Suparman, "Aspek Hukum Perdata Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang Undang Tentang Pengadaan Barang/Jasa", LKPP, Jakarta, 2014, hal. 6.
- Erwinsyahbana, Tengku & M. Melinda, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir", *Lentera Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2018, hal. 323–340.
<https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i2.7339>
- Ferdinand, Adam Khafi, Sunarto, Maya Shafira, "Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)", *Jurnal CEPALO*, Vol. 4 No. 2, 2020, hal. 111-128.
- Fithri, Beby Suryani, "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10 No. 1, 2017, hal. 83.
- Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 6 No. 11, 1999.
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6939>
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, "Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis Dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2013.
- Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, and Muhammad Syahid Arifin, "Kewenangan BPK Dalam Perhitungan Selisih Harga Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Dapat Dihitung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Authority of the BPK in Calculating Differences in Prices for the Procurement of Goods and Services That Can Be Calculated In", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5 No. 1, 2023, hal. 201–16.

- Indrawan, Jerry, Anwar Ilmar, dan Hermina Simanihuruk, "Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah", *Jurnal Transformativ*, Vol. 6 No. 2, 2020, hal. 133, <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/74>
- Januarsyah, Mas Putra Zenno, "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 3, 2017, hal. 267
- Kadir, Adi, "Aspek Hukum Pelanggaran Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah", *Jurnal Independent*, Vol. 8 No. 1, 2020, hal. 288, <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/114>
- Kagramanto, L. Budi, "Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU", *Jurnal Ilmu Hukum Yuditisia*, 2007, hal. 2.
- Kandjani, H., L. Wen, & P. Bernus, "Enterprise architecture cybernetics for collaborative networks: Reducing the structural complexity and transaction cost via virtual makelarage", *IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)*, Vol. 14 Issue 1, 2012.
- Kotijah, Siti, "Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batu bara", *Jurnal Yuridika*, Vol. 26 No. 3, 2011, hal. 10.
- KPK, "Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", hal. 9.
- KPK, Laporan Tahunan 2017, Jakarta, 2018.
- Kurniawan, Muhammad Rezza and Pujiyono, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform*, Vol. 14 No. 1, 2018, hal. 115. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241>
- Lestari, Dwi and Nur Fadrijih Asyik, "Analisis Fraud Pentagon Theory Dalam Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Sekaran)", *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, Vol. 1 No. 1, 2023, hal. 1–11. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20184>

- Made, Gleshya Regita Putri My, “Kewenangan KPPU Menjatuhkan Sanksi Daftar Hitam Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 5 No. 2, 2021, hal. 104.
- Mahardika dan Firman Wijaya, “Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik di Provinsi DKI Jakarta”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 1-25.
- Manurung, Tanti Adriani, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Ketentuan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Disertasi, Bandung: Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, 2009, hal. 79.
- Marcelino, Yosua, Muin Fahmal, and Fahri Bachmid, "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Suatu Studi Di Kota Makassar", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 4 No. 1, 2023, hal. 34–49.
- Merta, I Ketut, Ariawan, I. G. K., Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, & I Made Sugi Hartono, “Buku Ajar Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 6 No. 11, 2016.
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6939>
- Mulyadi, Mohammad, “Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol.15 No. 1, 2011, hal. 128.
- Mulyandini, V. C., Nugraha, A. A., & Kusumastuti, E. D., “Analisis Peran Fraud Pentagon Theory dalam Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang dan Jasa”, *ACCOUNTHINK: Journal of Accounting and Finance*, Vol. 8 No. 1, 2023, hal. 1–12.
- Musianto, Lukas S., “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian”, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 4 No. 2, 2002, hal. 125.

- Nayabarani, Sabrina Dyah, "Membangun Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Peningkatan Peran Ict Dalam Mereduksi Am Mereduksi Korupsi", Vol. 47 No. 4, 2017.
<<https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1586>>
- Pratama, Riski Syandri, "Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", Jurnal Pengadaan Barang/Jasa, Vol. 2 No. 1, 2023, hal. 1–13
<<https://doi.org/10.55961/jpbj.v2i1.32>>
- Rangkuti, Abdul Hafiz, Taufik Siregar & Zaini Munawir, "Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018)", ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 4 No. 1, 2022, hal. 1-16.
- Reza, Aditya Arie Syah, "Kajian Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa", Jurnal Hukum Dan Kebijakan Sosial, Vol. 5 No. 1, 2021, hal. 49–63.
- Riyanto, Benny, 'Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0', Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 No. 2, 2020, hal. 161–81.
<<https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910>>
- Setiawan, Adit, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Kontruksi Di Pengadilan Tipikor Yogyakarta", Jurnal Serambi Hukum, Vol. 14 No. 1, 2021, hal. 105–22.
- Silalahi, Udin dan Priskilla Chrysentia, "Persekongkolan Tender Berdasarkan Putusan KPPU dan Larangan Monopoli UU Praktik", Sriwijaya Law Review, Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 91-108.
- Sitorus, Rendra Alfonso, Syafruddin Kalo, Mahmud Siregar, M. Ekaputra. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Sidikalang: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 61/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn", 2019.

- Sumarni, Ade Titin and Ade Fitrah Putra Akhir, "Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode TOPSIS Untuk Menentukan Pemenang Tender Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu", *Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS)*, Vol. 3 No. 2, 2020, Hal. 71.
- Susanto, Sri Nur Hari, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. 1, 2019, hal. 126–142.
- Syam, Fauzi, et. al., "Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Peradilan Administrasi", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 1, 2019, hal. 52.
- Syamsuddin, Ahmad Rustan, "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa", *Jambura Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2020, hal. 161–81. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5942>
- Tambunan, Hendra Jhon Piter and Graychya Febri Simanungkalit, "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Jabatandalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa", *Jurnal Diktum*, Vol. 2 No. 3, 2023, hal. 15–24.
- Tedjokusumo, Dave David, "Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment Dan Pengurangan Lahan Di Pelabuhan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 44, 2023, hal. 6–7.
- Tiranda, Iriyanto, et al., "Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan". *Jambura Law Review (JALREV)*, Vol. 1 No. 2, 2019, hal. 123.
- Wardani, Dian Eka Kusuma, "Tinjauan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks)". *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 5 No. 4, 2023, hal. 1820-1830.
- Waryanto, Siti Malikthun Badriyah, and Irawati Irawati, "Pengadaan Barang dan Jasa yang Dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara", *Notarius*, Vol. 13 No. 2, 2020, hal. 694–709. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31095>

Wonoseto, Muhammad Galih, Arman Maulana, dan Mahfud Asyari, "Rancang Bangun Aplikasi Pengadaan Barang Dan Jasa Universitas Negeri XYZ Dengan Metode Extreme Programming", JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga), Vol. 8 No. 3, 2023, hal. 186–98.

Yuhassarie, Emmy, "Undang-Undang No. 5/1999 Dan KPPU: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan", Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hal. 165.

Website

Idtesis, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, Diakses 10 November 2023

Movanita, Ambaranie Nadia Kemala, "Ini Celah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa yang Berpotensi Korupsi". nasional.kompas.com, 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/28/19204361/ini-celah-kecurangan-pengadaan-barang-dan-jasa-yang-berpotensi-korupsi?page=all> Diakses 10 November 2023

Suparman, Eman, "Aspek Hukum Perdata Dalam Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadaan Barang/Jasa", 2014. http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_LaWZGOERamXJbauxbQLMcCetTgzDkUvR.pdf Diakses 10 November 2023

Hasil Penelitian

Astati, Desti, "Indikasi Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Palu-Sulawesi Tengah". Tesis, Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013, hal. 73

Fernando, Robi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Wanprestasi Dalam Jual Beli Motor Bekas Di Kota Metro". Skripsi, Metro: Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017, hal. 52

Yaser, Bram Mohammad, "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi". Tesis, Padang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2018, hal. 85

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1806 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pertimbangan Menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat